

LITERASI DIGITAL FINANCE PADA PENERIMA DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DIGITAL FINANCIAL LITERACY AMONG RECIPIENTS OF THE FAMILIY HOPE PROGRAM ASSISTANCE FUNDS

Raudhatul Jannah¹

IAIN Langsa
raudhatuljannah172001@gmail.com

Nanda Safarida

IAIN Langsa
nandasafarida@iainlangsa.ac.id

Noviandy

IAIN Langsa
noviandy@iainlangsa.ac.id

Received: 10 juni 2024	Revised: 30 juni 2024	Accepted: 30 juni 2024
------------------------	-----------------------	------------------------

Abstract

The frequent flow of digitalization requires the involvement of not only the commercial sector but also the social sector. This includes the distribution of social assistance funds by the government to beneficiaries using a digital system to make it more effective, efficient and more targeted. This research aims to determine the level of literacy and effectiveness of implementing digital finance among Family Hope Program (PKH) beneficiaries. The research method used in this research is a qualitative descriptive approach. This research is a type of field research with data collection techniques carried out by observation and interviews with the Head of Meunasah Teungoh Village, nine PKH beneficiaries in Gampong Meunasah Teungoh and a PKH Facilitator. The research results show that PKH beneficiaries do not have adequate digital finance literacy. This is especially shown at the stage of disbursement of aid funds. In the process of disbursing PKH funds which is carried out every 3 months or 4 times a year, PKH beneficiaries never make transactions via ATM machines and never have direct contact with the bank. This happens because there is relief in being able to be represented by other parties, which in this case is often entrusted to PKH assistants. As a result, recipients of PKH assistance funds are very dependent on PKH facilitator. Government regulations and policies regarding the distribution of PKH funds through banks and the existence of PKH facilitator are one of the efforts to increase digital financial literacy among PKH beneficiaries. On the other hand, the relief provided through disbursement by representatives to other parties and lack of socialitation on the use of digital finance as well resulted in the ineffective implementation of digital finance among PKH beneficiaries in Gampong Meunasah Teungoh.

Keyword : Digital finance; Literacy; PKH beneficiaries

Abstrak

Arus digitalisasi yang kerap terjadi menuntut keterlibatan tidak hanya sektor komersil tapi juga sektor sosial. Termasuk halnya dalam penyaluran dana bantuan sosial oleh pemerintah kepada

penerima manfaat yang menggunakan sistem digital agar lebih efektif dan efisien serta lebih tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi dan efektifitas penerapan digital finance pada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Meunasah Teungoh, sembilan orang penerima manfaat PKH di Gampong Meunasah Teungoh dan satu orang Pendamping PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat PKH belum memiliki literasi *digital finance* yang memadai. Hal tersebut terutama ditunjukkan pada tahap pencairan dana bantuan. Dalam proses pencairan dana PKH yang dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali pencairan dalam setahun, penerima manfaat PKH sama sekali tidak pernah melakukan transaksi melalui mesin ATM dan tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak Bank. Ini terjadi karena adanya keringanan untuk dapat diwakilkan kepada pihak lain yang dalam hal ini sering dipercayakan kepada pendamping PKH. Akibatnya penerima dana bantuan PKH sangat bergantung pendamping PKH. Peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan PKH melalui bank dan keberadaan pendamping PKH merupakan salah satu upaya untuk literasi digital finance kepada masyarakat penerima bantuan PKH. Namun, di lain pihak keringanan yang diberikan melalui pencairan dengan perwakilan kepada pihak lain dan kurangnya sosialisasi penggunaan *digital finance* berakibat pada tidak efektifnya penerapan *digital finance* pada masyarakat penerima bantuan sosial PKH di Gampong Meunasah Teungoh.

Kata kunci: Keuangan digital, Literasi, Penerima manfaat PKH

© 2024 Author



A. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di banyak daerah di Indonesia. Terkait hal tersebut berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin (Noor, 2014). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program yang selenggarakan pemerintah melalui Dinas Sosial yang merupakan program perlindungan sosial dalam wujud bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM). Ada berbagai persyaratan yang ditetapkan bagi RTM calon penerima bantuan agar mendapatkan akses terhadap bantuan ini. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM. Sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan (TNP2K, 2012). Digitalisasi bantuan tunai yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai disinyalir memiliki kontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusi. Digitalisasi Program Keluarga Harapan berpotensi membuka 10 juta rekening baru untuk para

penerima manfaat. Dengan kata lain, PKH dapat menyumbang sekitar 5 persen ke dalam indeks inklusi keuangan (OJK, 2021).

Gampong Meunasah Tengoh merupakan salah satu desa penerima bantuan PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Gampong Meunasah Tengoh pada tahun 2013. Hingga penelitian ini berlangsung PKH sudah berjalan selama 10 tahun. Gampong Meunasah Tengoh merupakan salah satu gampong dari Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Penerima bantuan PKH di Gampong ini ada sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK). Pendidikan masyarakat Gampong Meunasah Tengoh rata-rata mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan pekerjaan masyarakat didominasi oleh pertanian dengan rerata pendapatan yang masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil survey awal peneliti di Gampong Meunasah Tengoh terdapat permasalahan pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan terutama pada proses penyaluran bantuan PKH yang dilakukan secara non tunai melalui jasa perbankan dan diakses oleh penerima kartu PKH. Penerima manfaat PKH merasa sulit untuk mengakses menggunakan kartu penerima bantuan PKH. Kebanyakan masyarakat di Gampong Meunasah Tengoh yang menjadi penerima manfaat kurang paham menggunakan kartu ATM untuk melakukan pengecekan dan juga pengambilan dana bantuan. Padahal, Aktivitas *finance/keuangan* harus mencakup semua masyarakat terutama dalam mengakses produk atau layanan digital jasa keuangan, baik melalui aplikasi seperti *m-banking, e-wallet atau e-commerce*, segala kegiatan akan lebih cepat diselesaikan tanpa membuang banyak waktu (OJK, 2021). Hasil survey tersebut mengindikasikan kurangnya literasi *digital finance* pada penerima manfaat PKH di Gampong Meunasah Tengoh. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2018), literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi *digital finance* adalah pemahan terkait layanan jasa sistem pembayaran atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain *mobile based* maupun *web based* dengan target layanan masyarakat *unbanked* dan *underbanked*.

Penelitian terkait penerima manfaat dari PKH telah banyak dilakukan sebelumnya terutama yang berfokus pada literasi keuangan dan pengelolaan keuangan (Akbar & Pakanna, 2023; Andita & Budiastuti, 2023; Pariyanti, 2023; Pasapan et al., 2023; Sandra, 2015; Willdane & Swasti, 2023) ataupun pengelolaan keuangan secara

40 | AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 6, Issue. 1. Tahun 2024

digital (Anggraeni & Kerti, 2012; Nur Anggraeni, 2018) ataupun yang secara umum membahas tentang digitalisasi di sektor keuangan seperti *digital fintech* (Imelda et al., 2022), *electronic money* (Yusuf et al., 2022), *electronic payment* (Puswanti & Nasrullah, 2020), dan *digital banking* (Lestari & Sunarwan, 2021). Penelitian ini terfokus pada literasi keuangan digital pada penerima manfaat PKH.

Literasi *digital finance* seharusnya mempermudah masyarakat penerima manfaat PKH untuk bertransaksi terkait bantuan dana tersebut (Fahriansah et al., 2023; Marlina & Bimo, 2018; Yudha & Isgiyarta, 2015). Namun, masyarakat Gampong Meunasah Tungoh yang menjadi penerima manfaat justru merasa kesulitan dan menyebabkan adanya ketidaknyamanan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kemudahan dan manfaat *digital finance* sekaligus ditujukan untuk teralisasinya manfaat dan tujuan kartu Program Keluarga Harapan. Sementara itu, perlu juga dikaji sejauh mana penerapan *digital finance* melalui program PKH di Gampong Meunasah Tungoh dan tingkat efektivitas penerapan *digital finance* untuk mendukung peningkatan keuangan inklusi di Gampong tersebut. Efektifitas digunakan untuk melihat fenomena. Perbandingan antara rencana dan tujuan PKH dengan realita hasil yang terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat merupakan ukuran cara untuk mengukur tingkat efektivitas (Parni & Nurman, 2020). Namun jika hasil pekerjaan dan tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tujuan sehingga tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

B. KERANGKA TEORI

Literasi *Digital finance*

Pengertian umum dari literasi *finance* adalah pengetahuan dan juga keterampilan masyarakat yang mampu memberikan keyakinan terkait lembaga keuangan dan berbagai produk di dalamnya dalam parameter ukuran indeks. Namun, beberapa ahli dalam bidang ekonomi memiliki pandangannya sendiri terkait literasi *digital finance*. Manurung menjelaskan bahwa literasi *digital finance* adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam membuat keputusan dan kebijakan yang efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya (Manurung & Rahardjo, 2019). Sedangkan Mitchell dalam Safura berpendapat bahwa pemahaman *digital financial literacy* yang komprehensif dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus menghindarkan mereka dari tindak

pidana yang berkaitan dengan internet dengan cara mengukur kemampuan setiap orang dalam menjalani berbagai informasi ekonomi yang didapatkannya (Azizah, 2020).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2018), literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi *digital finance* adalah kemampuan mengelola uang yang dimiliki agar dapat berkembang dan hidup lebih baik di masa depan. OJK mengatakan program literasi *digital finance* kegiatan layanan jasa system pembayaran atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain *mobile based* maupun *web based* dengan target layanan masyarakat *unbanked* dan *underbanked* (Bank Indonesia). Akan memberikan edukasi di bidang keuangan agar masyarakat Indonesia dapat mengelola keuangan dengan cerdas, mengatasi kurangnya pengetahuan tentang industry keuangan, dan mencegah masyarakat tertipu dalam jangka pendek. Produk investasi yang menghasilkan keuntungan tinggi tanpa mempertimbangkan risiko

Prinsip- Prinsip Dasar Literasi Finance

Prinsip dasar dalam literasi *finance*/keuangan (OJK, 2021), yaitu:

1. Inklusif *finance*

Finance harus mencakup semua masyarakat, dalam mengakses produk atau layanan digital jasa keuangan, baik melalui aplikasi seperti *m-banking*, *e-wallet* atau *e-commerce*, segala kegiatan akan lebih cepat diselesaikan tanpa membuang banyak waktu.

2. Sistematis dan terukur

Literasi keuangan disampaikan secara terprogram, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur. Kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas dan kebijakan pelaku usaha jasa keuangan serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan literasi keuangan.

3. Berorientasi pada Pencapaian dan Berkelanjutan

Kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan meningkatkan literasi *digital finance* dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan mempunyai aspek jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

4. Kolaborasi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan literasi *digital finance*.

Efektifitas Pada Program Keluarga Harapan (PKH)

Efektivitas dapat dimaknai sebagai unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, suatu kegiatan ataupun program. Dapat dikatakan efektif apabila suatu tujuan ataupun sasaran telah tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Sebagaimana dikutip oleh Mustafa Hasbar dan Agung Wijaya, mengatakan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yakni efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok (Hasbar & Wijaya, 2017).

Tingkat efektivitas pada PKH dapat diukur dengan membandingkan antara rencana dan tujuan PKH dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dalam pelaksanaannya di masyarakat. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tujuan sehingga tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas PKH dapat didefinisikan sebagai pengukuran keefektifan program dengan melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program yang dibuat oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dan memberikan kontribusi untuk membantu RTM baik untuk kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, efektivitas dapat diukur melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program bantuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berikut indikator keberhasilan PKH:

1. Tepat sasaran penerima bantuan

Bantuan Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada RTM yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos verifikasi sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Tepat jumlah

Jumlah uang yang diterima oleh peserta PKH sesuai dengan besaran bantuan komponen yang didapat.

3. Tepat waktu

Waktu pelaksanaan distribusi Program Keluarga Harapan dilakukan empat kali dalam satu tahun yaitu tahap pertama bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap Ketiga bulan Juli, dan tahap keempat di bulan Oktober.

4. Tepat penggunaan

Penggunaan dana bantuan PKH dipergunakan sesuai dengan komponen yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field survey*). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan wawasan pemikiran peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang sedang diteliti. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan penelitian yang berhubungan dengan data yang berupa menjawab persoalan penelitian yang berhubungan dengan masyarakat (Umar, 2015). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan teori Mile dan Hubberman yang mengawali analisis dengan reduksi data, dilanjutkan penarikan kesimpulan dan penyajian data dalam hasil dan pembahasan (Bungin, 2015).

Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting (kondisi yang alamiah) peneliti sebagai instrumen penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder (Kamal et al., 2022; Uhar, 2012). Penelitian ini dilakukan di Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Budiman, 2021; Bungin, 2013; Kamal et al., 2023). Wawancara dilakukan dengan beberapa informan kunci dan pendukung (Sulistiyono et al., 2022). Adapun informan yang dimaksud adalah Kepala Desa (Geuchik Gampong) Meunasah Teungoh, sembilan (9) orang penerima manfaat PKH dan satu (1) orang pendamping PKH yang ada di gampong tersebut. Sumber Teknik keabsahan data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi baik sumber, waktu maupun teknik dilakukan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid.

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Gambaran Literasi *Digital finance* Pada Masyarakat Penerima Manfaat PKH

Penyaluran dana PKH atau bantuan tunai hanya diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) telah lolos seleksi mengikuti setiap syarat program memenuhi komponen PKH melakukan validasi dan pemuhtakhiran data dan telah terpilih sebagai

peserta PKH. Selanjutnya, untuk membuktikan kepesertaannya seluruh peserta PKH memiliki kartu PKH yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu PKH tersebut diberikan oleh pendamping PKH secara langsung setelah peserta dinyatakan lolos sebagai peserta PKH. Tahun 2007-2015 menjadi awal peluncuran program PKH. Ada 3 tahapan proses pencairan yang dapat dilakukan di kantor pos tiap-tiap wilayah penerima PKH. Semenata itu, untuk tahun 2016-2020, proses pencairan dana PKH dilakukan dalam 4 tahapan selama 1 tahun dan pencairan dilakukan 3 bulan sekali melalui Bank.

Pencairan dilakukan di Bank dengan syarat penerima PKH sudah memiliki kartu ATM penarikan tunai bisa lewat ATM, hal ini sebagaimana seperti yang dijelaskan oleh pendamping PKH Ibu Nurmaya sebagai berikut:

“Pencairan dana PKH bagi peserta yang baru sama saja dengan yang lama mereka mendapatkan kartu peserta PKH mereka ke Bank mencairkan dananya, waktunya juga sama dengan peserta lama, jadi sebelumnya peserta diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga sebelumnya di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan, dan saat ini pemerintah memudahkan peserta PKH bisa mencairkan bantuan melalui rekening Bank dengan ATM” (Nurmaya, 2023)

Dari hasil wawancara bahwa pencairan baru bisa dilakukan apabila peserta memiliki kartu PKH dan pencairan dilakukan di Bank yang telah ditetapkan dan dilakukan masing-masing. Pencairan dilakukan di Bank yang telah ditentukan oleh PKH dan sekarang tidak lagi didampingi oleh pendamping dalam menerima karena semua peserta PKH sudah memiliki rekening ATM masing-masing, jadi dalam pencairan semua masing-masing peserta mengambil uangnya sendiri-sendiri tanpa perantara lagi. Terkait proses pencairan dana bantuan dan tidak didampingi oleh pendamping PKH, maka peneliti mewawancarai ibu Nurmaya selaku pendamping PKH Gampong Meunasah Teungoh untuk dapatkan jawaban tidak ada lagi pendampingan pada saat pencairan dana melalui ATM:

“Dalam pencairan dana PKH itu dilakukan setiap 3 bulan (triwulan) sekali dalam 4 kali pencairan dalam setahun. Dan sekarang itu semua peserta sudah bisa mencairkan sendiri karena mereka yang pegang kartunya masing-masing tinggal mereka tunggu kapan tanggal pencairan dana dan sudah tidak didampingi lagi, dan peserta juga lebih mengetahui kapan uangnya masuk dan sekarang peserta ada yang didampingi oleh keluarganya sendiri saat ke Bank dan tidak di damping lagi oleh pendamping PKH, karena tidak ada kebijakan medampingi peserta PKH saat pencairan dana di Bank dengan menggunakan ATM masing-masing peserta” (Nurmaya, 2023)

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Taufik Fauzal selaku Geuchik mengenai proses pencairan :

“Kalau pencairan itu dilakukan di Bank setiap 3 bulan (triwulan) sekali dalam 4 kali pencairan dalam 1 tahun. Dan seharusnya menurut saya harus didampingi oleh pendamping masing-masing dalam mencairkan dana supaya pendamping bisa memutakhirkan data-data peserta, dan agar para peserta yang terkendala bisa langsung koordinasi dengan pendamping, namun untuk tahun ini saya perhatikan karna pencairan masing-masing peserta melalui Bank dan menggunakan Mesin ATM jadi tidak ada pendampingan, ini mungkin sudah kebijakannya”. (Fauzal, 2023)

Dari wawancara yang peneliti dapatkan bahwa pencairan di Bank melalui ATM masing-masing dan tidak dilakukan pendampingan, dan pendapat Geuchik mengatakan bahwa jika pada saat pencairan harus didampingi oleh pendamping masing-masing agar pendamping dapat memuktakhirkan data-data dipusat atau jika ada kendala lainnya. Namun dengan dialihkannya ke Bank maka pendamping lebih susah mendata dana yang masuk di setiap peserta PKHnya, apakah peserta mendapatkan dana sudah sesuai dengan komponen masing-masing peserta.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait dengan bantuan PKH yang diterima oleh peserta apakah sudah dapat meringankan beban pengeluaran keluarga, dan dari pernyataan peserta PKH mengatakan bahwa sejak awal peserta PKH mengaku senang meskipun bantuan diberikan bukanlah bantuan penuh, mereka sudah bersyukur karena dengan adanya bantuan ini bisa meringankan beban pengeluaran keluarga, mereka juga berharap bahwa bantuan ini berjalan terus, dan hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Taufik Fauzal selaku Geuchik bahwa :

“Saya rasa bantuan ini sudah dapat membantu masyarakat saya, dan selaku kepala saya hanya bisa berpesan agar masyarakat memanfaatkan bantuan ini semestinya dan seperlunya agar bermanfaat dan berkecukupan untuk keluarganya. Dan jika dikatan apakah bantuan ini bisa memecahkan kemiskinan saya rasa tidak hanya saja membantu kebutuhan masyarakat yang kurang mampu”(Fauzal, 2023).

Dari hasil wawancara dengan bapak Geuchik dapat ditarik kesimpulan bahwa program ini harus dimanfaatkan oleh peserta sebaik-bainya dan digunakan semestinya. Dalam memecahkan kemiskinan dimasyarakat itu sulit untuk dilakukan karena tingginya angka kemiskinan namun dalam meringan beban masyarakat program bantuan seperti PKH ini mampu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya dan memang mereka benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan ini.

Program Keluarga Harapan sudah berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah di tetapkan, akan tetapi masih terdapat keluhan peserta PKH terkait dengan mekanisme tarik tunai dana bantuan PKH melalui Bank menggunakan kartu ATM PKH, maka penulis selanjutnya mengkaji pemahaman masyarakat penerima PKH terkait *digital finance*, yaitu:

1. Peserta tidak bisa menggunakan ATM

Masyarakat atau peserta PKH kurang paham dengan mekanisme tarik tunai dana bantuan PKH melalui Bank menggunakan kartu ATM PKH, maka penulis selanjutnya mengkaji pemahaman masyarakat penerima PKH memahami literasi *digital finance* yang peneliti wawancarai seperti Ibu Badriah mengatakan bahwa:

“Saya sama sekali tidak tau tentang cara menggunakan ATM, karena karena saya tidak pernah melakukan transaksi atau menabung di Bank, saya, dan sebelumnya saya juga tidak pernah masuk ke ruang ATM karna tidak ada kepentingan didalamnya, saya masuk ke ruang ATM ini karena harus mengambil uang dari Bank dan diarahkan saya ke ATM baru saya mengetahui seperti ini ATM dan saya di bantu sama cucu saya” (Badriah, 2023).

Pada tahap awal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Ibu Badriah sama sekali tidak mengetahui akan keberadaan Mesin ATM, sehingga beliau tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak Bank. Dihari yang sama di jam yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Emi Andrani terkait dengan pencairan dan penarikan bantuan dana melalui buku rekenig dan anjungan tunai mandiri (ATM):

“Saya tau adanya tarik tunai dari ATM sebelumnya saya di ajarkan penggunaanya sama anak sepupu saya tetapi saya tidak menabung di Bank saya hanya menggunakan ATM untuk mengambil dana bantuan PKH, dan setiap mau ke ATM saya sering kebingungan waktu ingin mencairkan uang bantuan itu karena saya sering lupa Passwordnya” (Andriani, 2023)

Penggunaan ATM memang dinilai sangat tepat dilakukan sehingga dana yang diterima akan tepat waktu. Untuk anggota PKH yang kesulitan dalam pencairan dana, maka boleh diwakilkan selama wakil yang ditunjuk tersebut dapat dipercaya oleh anggota PKH tersebut.

2. Kesulitan dalam Pencairan dana PKH di Bank

Sejak pertengahan 2018 sampai dengan saat ini, bantuan PKH disalurkan secara non tunai melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). KKS ini merupakan kartu berwarna merah putih sekaligus berfungsi sebagai ATM yang diterbitkan oleh Bank bersamaan

dengan buku tabungannya. Tujuan awal dari transformasi tunai menjadi non tunai, salah satunya agar bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari potongan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena KKS ini harus dipegang oleh masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pemegang KKS ini merupakan warga miskin yang telah ditetapkan sebagai KPM bantuan sosial PKH maupun Sembako. Mereka dapat mengambil bantuan PKH melalui ATM/Agen Bank terdekat, seperti yang dijelaskan ibu Rohani dalam wawancara ibu Rohani menjelaskan bahwa:

“Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS ini kan harus dibawa sendiri dan proses pengambilan juga dilakukan sendiri, tidak boleh dititipkan kepada pendamping, atau diwakilkan kepada siapa pun. tidak boleh ada imbal jasa atau pungutan apa pun yang dikenakan kepada para peserta PKH jadi saya sendiri ke Bank dan saya bingung prosesnya, jadi saya harus dibantu sama petugas Bank seperti Satpam, kalau dulu kan saya tinggal antri di kantor pos dan tunggu di panggil, sekarang saya tidak mengerti sama sekali, dan pengambilan uang di ATM juga di bantu sama Satpam, memang waktu itu saya diajari tapi saya lupa lagi karena memang tidak pernah menggunakan ATM dan tidak pernah berhubungan dengan Bank” (Rohani, 2023)

Begitu juga yang dirasakan oleh ibu Santri Wahyuni menjelaskan bahwa:

“Saya tidak bisa menggunakan ATM di Bank syariah Indonesia waktu itu karena bagi saya Bank BSI sekarang ini kan baru dan belum saya ketahui bagaimana membuat buku rekening begitu juga menggunakan ATM nya karna Menu di mesin ATM nya berbeda dengan ATM yang sebelumnya saya pakai di BRI, jadi samar-samar dikarenakan saya lebih dahulu mengenal Bank konvensional dan karena kurangnya pengetahuan, walaupun sekarang semua sudah di Alihkan ke Bank BSI. Tapi jarang untuk ke Bank BSI, palingan cuma untuk ambil uang melalui ATM yang di bantu sama adik saya, karena dia sudah mengerti tarik tunai dan transfer uang dari ATM, jadi waktu ada informasi pencairan dana PKH saya ajak adik saya, karena saya kurang paham pencairan dana PKH di Bank” (Santriwahyuni, 2023)

Terkait dengan pemahaman digital finance dan Kesulitan cairkan dana PKH di Bank ibu Juliana juga menjelaskan bahwa:

“Saya tidak paham tentang pencairan dana di Bank dengan ATM, jadi setiap melakukan Pencairan saya selalu lapor dulu sama pendamping dan pendamping mengarahkan saya ke Bank, sampai di Bank saya lapor sama petugas Bank untuk di Bantu pencairan dana PKH, saya pernah coba sendiri sampai di ATM saya bingung akhirnya saya keluar lagi minta tolong sama Satpamnya dan dibantu sama Satpam, tapi diruang ATM saya lupa menaruh catatan *Password* ATM nya dan akhirnya uang tidak bisa di tarik” (Juliana, 2023)

Jadi disinilah pentingnya Bank Syariah dan pendamping PKH memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih memahami keberadaan bank syariah dan dengan memahami bagaimana cara menggunakan ATM dan diharapkan dapat memberi arah kepada masyarakat untuk proses dan langkah menggunakan ATM. Selain itu masyarakat penerima PKH ini merasa kurang paham terhadap kondisi peralihan Bank dari Bank BRI menjadi Bank BSI sehingga dalam proses pergantian kartu atau proses pembuatan buku rekening baru dan kartu pengganti kartu ATM dalam proses memerlukan kehadiran KPM yang bersangkutan tanpa diwakilkan hal ini sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan disertai dokumen identitas diri meliputi *electronic*-Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) atau Kartu Keluarga (KK) serta dokumen pendukung keterangan lainnya.

3. Kurangnya Sosialisasi Pendamping tentang Literasi Digital pada Peserta PKH

Peran pendamping sosial terhadap keluarga penerima manfaat PKH dalam memberikan dukungan, semangat, melatih kemampuan individu ataupun kelompok dalam menyelesaikan masalah serta membantu meningkatkan kepercayaan diri untuk menuju kearah kehidupan yang lebih baik. Pendamping PKH menerima dan melakukan tugasnya untuk menyelesaikan masalah ketika ada pengaduan dari peserta PKH, Peran ini dilakukan apabila peserta PKH tidak mampu menyelesaikan suatu masalah, atau memiliki urusan dengan instansi lain yang terkait dengan PKH tetapi harus dengan bantuan pendamping sosial PKH.

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi: pembukaan rekening penerima bantuan social di Bank, Sosialisasi dan edukasi, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Proses penyaluran bantuan sosial PKH, Penarikan dana bantuan sosial PKH melalui ATM dan menggunakan kartu masing-masing peserta PKH, Rekonsiliasi hasil penyaluran dana bantuan sosial PKH dan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan social semua sudah dijalankan oleh pendamping, akan tetapi terkait dengan literasi dan pemahaman digitalisasi juga harus di pandu dari pihak Bank.

Agar dapat penjelasan terkait dengan kurangnya sosialisasi pada peserta PKH, peneliti juga mengadakan wawancara sebelumnya dengan Ibu Nurmaya selaku pendamping PKH Gampong Meunasah Teungoh dan menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk pendampingan waktu pencairan kadang saya sebagai pendamping ada juga dimintai tolong untuk mengambil uang di Bank karena rata-rata penerima

PKH ini kan sudah lansia dan kurang paham dengan proses transaksi modern saat ini, dan para peserta PKH ini juga banyak yang mengeluh terkait dengan pencairan di Bank melalui ATM karena mereka kurang paham dan kurang mengerti/tidak bisa, ada yang melaporkan bahwa mereka lupa *password* lupa atau catatan *password* hilang, dan ada juga waktu buka buku rekening mereka masih tidak paham dan walaupun sebelumnya sudah dikasih buku panduan langkah-langkah mengambil uang di ATM” (Nurmaya, 2023)

Ibu Nurmaya juga menceritakan, ia pernah mendapatkan keluhan dari peserta PKH yang kehilangan uang sebelum uang tersebut diambil. Namun, saat pihak pendamping PKH mengecek ke Bank Syariah Indonesia (BSI), ada bukti pengambilan. Saat diurus ke pihak BSI, uang bisa kembali tapi dua minggu kemudian. Tidak tahu kenapa bisa begitu tapi kebanyakan yang bermasalah lansia karena mereka tidak bisa menggunakan ATM dan lupa *password* sehingga harus dibantu pencairannya dari pihak Bank maupu saudara terdekatnya.

Efektifitas Penerapan *Digital finance* pada masyarakat penerima PKH

Hasil wawancara pada saat penelitian pada penerima PKH di Gampong Meunasah Teungoh mengenai efektifitas dalam penggunaan *digital finance* pada masyarakat penerima PKH disinilah terjadi keluhan peserta penerima PKH yaitu:

1. Lokasi ATM Jauh

Jarak lokasi ATM menjadi yang kurang efektifitas terhadap pencairan dana peserta PKH, dalam pencairan dana bantuan PKH adalah belum tersebarnya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gampong Meunasah Teungoh sebagai badan bayar bantuan PKH sehingga masyarakat harus keluar ke Kecamatan yang jaraknya lumayan jauh dari Gampong tersebut. Sehingga penerima bantuan harus mendatangi kecamatan lain yang ada ATM untuk mengambil bantuan PKH. Terkait dengan hal demikian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Mursyidah dan mengatakan bahwa:

“Lokasi ATM yang tidak terjangkau membuat kami kesusahan untuk tempuh jarak melakukan pencairan dana PKH, kalau misalkan ada kendaraan sendiri juga harus isi minyak dulu sekitar Rp. 20.000 rupiah, dan kalau tidak ada kendaraan sendiri biasa minta tolong diantarkan sama orang yang sudah kita kenal dan mengeluarkan uang sewa sebesar Rp. 20.000 juga”(Mursyidah, 2023).

Dihari yang sama Ibu Manawiyah juga memberikan keterangan terkait dengan efektifitas dalam penggunaan *digital finance* pada masyarakat penerima PKH terkait dengan lokasi ATM yang tidak terjangkau oleh masyarakat:

“Benar Wilayah Kecamatan ini cuma ada satu Bank BSI jadi kalau kita mau mengecek saldo kita apakah uang bantuannya sudah masuk atau tidak kita harus pergi ke ATM yang jaraknya jauh, dan belum lagi kurang informasi kapan uangnya masuk ke rekening kita, untuk pencairan pertama kali kita dijadwalkan pada akhir bulan Desember, jadi sebelum pencairan pendamping minta ada perkumpulan dulu, ngecek dulu bener tidak uangnya sudah masuk” (Manawiyah, 2023)

Pencairan bantuan PKH bekerjasama dengan Bank, pencairan dilakukan di ATM setiap tiga bulan sekali pada tanggal yang sudah ditentukan masing-masing. Pembayaran pertama diberikan setelah pertemuan awal yang diikuti oleh kunjungan pertama ke penyedia layanan untuk melakukan verifikasi. Namun masyarakat merasa terkendala karena belum tersebarnya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia (BSI)

2. Ketergantungan pendamping dalam pencairan dana bantuan PKH di Bank

Pelaksanaan PKH didalamnya terdapat pendampingan yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan PKH. Pendampingan PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksanaan pendampingan ditingkat Kecamatan. Pendampingan memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada peserta penerima PKH, melakukan pendampingan dan memberikan informasi, dengan demikian, peran pendamping dalam PKH yaitu untuk mengupayakan agar masyarakat mempunyai keberadaan diri dalam membangun, mengembangkan, dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Oleh karena itu pendampingan dalam PKH sangat penting bagi penerima PKH.

Pengentasan kemiskinan melalui PKH akan bergantung pada peran dan fungsi dari berbagai program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah mendefinisikan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat begitu juga terhadap efektifitas dalam penggunaan *digital finance* pada penerima PKH saat melakukan penarikan uang di Bank melalui ATM, hal ini juga di jelaskan oleh Ibu Herawati sebagai penerima PKH:

“Pendamping bantuan sosial PKH sudah melakukan pendampingan dengan baik artinya kinerja pendamping baik. Tugas yang sudah pendamping laksanakan

pertama pendamping membuat pertemuan dan memberikan informasi, arahan dan petunjuk untuk proses pencairan dari awal sampai uangnya bisa di tarik dan digunakan, tapi kami saja yang kurang paham tentang kecanggihan alat zaman sekarang” (Herawati, 2023).

Sama halnya dengan ibu Herawati dan ibu Maryani juga mengatakan :

“Mengenai kinerja pendampingan PKH di Gampong Meunasah Teungoh yaitu baik, karena pendamping sudah melaksanakan semua tugas-tugasnya orangnya ramah, dan saya sangat puas dengan pelayanan, seperti ada kendala dengan pencairan dana melalui mesin ATM kan banyak diantara kami kurang paham menggunakan, dan pendamping PKH selalu merespon dan melayani permasalahan kami dengan baik sampai permasalahan kami tuntas terselesaikan” (Herawati, 2023)

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima PKH Gampong Meunasah Teungoh mengenai kinerja pendamping sosial PKH bahwa pendamping bantuan sosial PKH sudah melakukan pendampingan dengan baik sesuai dengan pedoman PKH, yaitu pertama pendamping membuat pertemuan sampai dengan melaksanakan penanganan pengaduan sampai tahap akhir menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan, karena masyarakat sekarang kebingungan untuk penarikan uang di ATM sehingga mereka selalu koordinasi dulu dengan Pendamping sebelum datang ke Bank untuk pencairan dana PKH.

3. Kurangnya Anggota Pendamping PKH

Pertemuan setiap bulan merupakan salah satu rutinitas yang dilakukan oleh pendamping, peserta PKH di Gampong Meunasah Teungoh, yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati secara bersama dan lokasinya biasanya di meunasah dan ditempat rumah warga yang sudah ditetapkan dan disepakati. Pertemuan itu dilakukan untuk mengecek apakah ada perubahan data pada setiap peserta PKH.

Sebagaimana di sampaikan oleh salah satu peserta PKH yaitu Ibu Badriah

“Benar setiap bulannya ada pertemuan, warga yang mendapatkan bantuan PKH ini banyak jumlahnya dan pendamping PKHnya untuk 1 Gampong 1 Satu orang jadi menurut saya pendamping PKH merasa kewalahan melayani keluhan masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH, dan kurang jadwal waktu untuk menyampaikan informasi dan keluhan lainnya, dan tidak semua keluhan peserta dapat di tanggapi oleh pendamping, dan menurut saya setidaknya dalam satu Gampong itu pendamping nya 2 orang baru bisa cepat terealisasi keluhan dan penyampaian informasi pada peserta PKH” (Badriah, 2023)

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa pertemuan bulanan memang benar dilaksanakan dan ada juga pada bulan sebelumnya tertunda tidak dilaksanakan pada pertemuan tersebut ada peraturan yang harus di taati oleh setiap peserta PKH dan itu harus mau tidak mau harus dipenuhi setiap syaratnya jika masih tetap mendapatkan bantuan ini, sebagaimana dijelaskan

“Saya tidak turun lapangan langsung meninjau pelaksanaan pertemuan bulanan pada peserta PKH, dan setiap mau diadakan pertemuan, pendamping PKH selalu koordinasi dulu dengan Geuchik Gampong, dan jika ada kendala pada warga masyarakat saya, apa komitmen peserta itu akan kita laksana dengan baik tapi menurut laporan yang masuk kepada saya sudah terlaksana dengan baik jika dilihat dari laporannya ya. Sedangkan pertemuan bulanan ini yang saya tekankan bahwa harapannya pendamping untuk mengoptimalkan pendampingannya kepada setiap peserta agar peserta mampu memahami apa sebenarnya tujuan dan manfaat dari bantuan ini untuk mereka” (Fauzal, 2023).

Dari penjelasan saat wawancara dengan bapak Geuchik menyimpulkan bahwa komitmen dan pertemuan bulanan harus dilaksanakan dengan baik dan harus selalu diperhatikan agar bantuan ini bermanfaat bagi penerima bantuan. komitmen dan pertemuan bulanan sudah berjalan lancar efektivitas jumlah pendamping PKH di Gampong tersebut belum terlaksana dengan maksimal.

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. (M. Richard, 2014: 123). Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil yang didapat melalui observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan dari hasil di lokasi penelitian terkait dengan pemahaman masyarakat penerima PKH memahami literasi *digital finance* di Gampong Meunasah Teungoh sepenuhnya masih kurang informasi dan belum benar paham terhadap literasi *digital finance* ini disebabkan karena peserta penerima PKH rata-rata masuk dalam kategori lansia sehingga tidak dapat mengakses informasi dan layanan keuangan yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh individu dari kalangan atau yang tinggal di tempat tertentu saja.

Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara jadi masyarakat merupakan kemampuan untuk

menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Dengan demikian pemahaman peserta PKH masih rendah terkait dengan penggunaan dan pemahaman digital finance pada saat melakukan penarikan uang melalui bank dengan menggunakan ATM masih banyaknya penerima manfaat PKH tidak paham cara menggunakannya hal ini karena masyarakat kurang mendapatkan edukasi baik itu dari pihak pendamping maupun dari pihak Bank.

Sementara itu, terkait tingkat efektivitas dari penerapan *digital finance*, berdasarkan survey di lapangan ditemukan bahwa efektivitas penggunaan *digital finance* pada masyarakat penerima PKH tersebut belum berjalan dengan efektif karena hanya sebagian kecil dari masyarakat penerima manfaat PKH yang mengetahui dan paham terkait dengan *digital finance* dengan adanya penyaluran bantuan dana PKH yang dicairkan melalui Bank dan penarikan uang dari mesin ATM. Sebagian kecil masyarakat pun sudah paham dan sudah mempraktekannya walaupun hanya satu bulan dan dua bulan mereka melakukan transaksi di mesin ATM. Oleh sebab itu, diharapkan kepada pihak terkait dapat dilakukan monitoring dan evaluasi kembali serta dibutuhkan koordinasi antar berbagai pihak agar digitalisasi PKH dapat dimaksimalkan dampaknya bagi seluruh penerima manfaat PKH sehingga diharapkan mampu meningkatkan keuangan inklusif.

E. KESIMPULAN

Masyarakat penerima PKH belum memiliki tingkat literasi *digital finance* yang memadai. Hal tersebut terutama ditunjukkan pada tahap pencairan dana bantuan. Dalam proses pencairan dana PKH yang dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali pencairan dalam setahun, penerima dana PKH sama sekali tidak pernah melakukan transaksi melalui mesin ATM dan tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak Bank. Ini terjadi karena adanya keringanan untuk dapat diwakilkan kepada pihak lain yang dalam hal ini sering dipercayakan kepada pendamping PKH. Akibatnya penerima dana bantuan PKH sangat bergantung pendamping PKH. Peraturan dan kebijakan pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan PKH melalui bank dan keberadaan pendamping PKH merupakan salah satu upaya untuk literasi *digital finance* kepada masyarakat penerima bantuan PKH. Namun, di lain pihak keringanan yang diberikan melalui pencairan dengan perwakilan kepada pihak lain dan kurangnya sosialisasi penggunaan *digital finance*

berakibat pada tidak efektifnya penerapan *digital finance* pada masyarakat penerima bantuan sosial PKH di Gampong Meunasah Teungoh. Selain itu, akses mesin ATM masih dirasa sulit dan tidak terjangkau. Masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi tinggi karena harus keluar ke kecamatan untuk mengambil bantuan PKH.

Hasil yang diungkap dalam penelitian ini selanjutnya merekomendasikan kepada pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait untuk dilakukannya sosialisasi dan pendampingan lebih jauh terhadap pemanfaatan *digital finance*, sehingga manfaat positif dari *digital finance* sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muh., & Mukhaer Pakkanna. (2023). The Role of the Family Hope Program (PKH) in Enhancing Family Literacy and Financial Management from the Perspective of Islamic Economics. *Kontingensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(2). <https://doi.org/10.56457/jimk.v11i1.416>
- Andita, V., & Endah Budiastuti. (2023). Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan & Perencanaan Usaha pada KPM PKH. *SOCIRCLE : Journal Of Social Community Services*, 2(1), 23–27. <https://doi.org/10.58468/socircle.v2i1.10>
- Anggraeni, Ni Made Savitri & Yasa Ni Nyoman Kerti. (2012) E-Service Quality Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Dalam Penggunaan Internet Banking. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v16i2.1072>

- Anggraeni, Fitria Nur. (2018). Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Fasilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan. *Economic Development Analysis Journal*. 6(1) <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i1.22199>
- Budiman, I. (2021b). The islamic perspective on the improvement of family economy in the new normal. *Samarah*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.8389>
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Fahriansah, Safarida, N., & Midesia, M., (2023). Buy Now, Think Later: Impulsive Buying Behaviour among Gen Z in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(2). <http://dx.doi.org/10.22373/share.v12i2.17453>
- Kamal, S. et al. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2). <http://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.487>
- Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A. and Muttaqin, Z. (2023). How do muzakki pay professional zakat? (the qualitative inquiries using the Bloom model. *Journal of Islamic Marketing*, 15(3). <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2022-0046>
- Khadafi, Rizal dan Dyah Mutiarin. (2017) “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul”, *Journal of governance and public policy*, 4 (2) <https://doi.org/10.18196/jgpp.v4i2.2993>
- Mahaeni Aain i, “Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali”, *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Vol. X No.1, Juli 2014
- Marlina, 2018. Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Jurnal Ilmiah Inovator*, 7 (1) <https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458>
- Hasbar Mustafa, Wijaya Agung, “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dengan Pendekatan Strategy SWOT Analysis Di Kabupaten Enrekang”, *E-Jurnal*, 2016
- Imelda, Tri; Mahmudah, Nurul; Liberty, Liberty. Analisis Strategi Pemasaran Bank Syari'ah Berbasis Digital Fintech Terhadap Pelayanan Nasabah Bank Muamalat Kcp Metro. **FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah**, [S.l.], v. 4, n. 2, doi: <https://doi.org/10.32332/finansia.v4i2.3061>
- Lestari, Putri; Liberty, Liberty; Sunarwan, Aisyah. Analisis Swot Digital Banking Di Bri Syariah Kcp Tulang Bawang Barat. **FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan**

Perbankan Syariah, [S.l.], v. 4, n. 1.
doi: <https://doi.org/10.32332/finansia.v4i1.3045>.

- Noor, Munawar, (2014). Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang), *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, 3(1).
<http://dx.doi.org/10.56444/sa.v3i1.127>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. In Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia2021-2025.aspx>
- Pariyanti, Eka. (2023). Peningkatan Literasi dan Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Ibu Rumah Tangga Penerima Bantuan PKH. *SOCIRCLE : Journal Of Social Community Services*, 2(2). <https://doi.org/10.58468/socircle.v2i1.7>
- Parni Mai, Nurman S. (2018). Pemanfaatan Dana PKH oleh Masyarakat Kurang Mampu di Kanagarian Alahan panjang *Journal of Civic Education*, 1(1)
<http://doi.org/10.24036/JCE.V1I4.305>
- Pasapan, Desi Ratnasari, Dina Ramba, Mince batara, Adrew Ridow Johanis M. (2023). Pengaruh Locus Of Control Dan Financial Knowledge Terhadap Personal Financial Management Behavior Masyarakat Penerima Bantuan PKH Kecamatan Tondon. *JED (Jurnal Enterpreneur Digital)*, 1 (1)
- PUSWANTI, Teresia; NASRULLAH, Muhammad. Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Alat Pembayaran Non Tunai Terhadap Money Supply di Indonesia. **FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah**, [S.l.], v. 3, n. 1. doi: <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i1.1727>
- Safura, Nurul. *Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Pada Perilaku Keuangan Pada Generasi Milenial*, 2020, prisma platform riset mahasiswa akuntansi.vol 1, No.2
- Sandra, J. “Measuring financial Literacy”. *The Journal of Consumer Affairs*.2015, Vol. 44 No. 2.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif Dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012
- Sulistiyono, S. W., Suliswanto, M. S. W., Dewa, P. K., Santosa, S., & Astina, C. (2022). Revenue optimization strategy through digitizing retribution parking in Kota Batu. *Journal of Revenue and Pricing Management*, 21(4).
<https://doi.org/10.1057/s41272-021-00333-y>
- Umar, Husen. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015

- Willdane, Arief & Ika Korika Swasti. (2023). Sosialisasi Manajemen Finansial Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengeluaran Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH Warga RW 7 Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(3), 142–148. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i3.1358>
- Yudha, Hafid Nur & Jaka Isgiyarta. (2015). *Analisis Pengaruh Persepsi Nasabah Bank Terhadap Internet Banking Adoption (Studi Pada Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Internet Banking Di Kota Surakarta)*”, Diponegoro Journal Of Accounting, Semarang, 4 (4).
- Yusuf, Yusuf; Sudiarti, Sri; Harahap, Muhammad Ikhsan. Transaksi Uang Elektronik E-Martabe Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Pada Bank Syariah. **FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah**, [S.l.], v. 5, n. 2. doi: <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5460>